

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Teoritik

Pemberdayaan masih menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah dalam aspek pembangunan. Peran dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan pemerintahan bisa dikatakan masih rendah dan sebagai pekerja perempuan Indonesia masih mengalami diskriminasi atau hal yang paling terlihat adalah ketimpangan gender. Istilah gender yang kita ketahui sering diartikan sebagai jenis kelamin, gender juga dapat diartikan sebagai adanya hubungan nilai-nilai sosial antara laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman karena gender tidak melekat pada jenis kelamin tetapi pada pelabelan masyarakat. Peran gender memiliki pengertian sebagai perilaku dan sikap yang umumnya dapat diterima, sesuai, atau diinginkan oleh seseorang sebagai kegiatan, tugas-tugas atau tanggung jawab bagi laki-laki maupun perempuan. Peran gender ini dapat berubah seiring berjalannya umur, kelas, etnik atau agama dan lingkungan. Setiap orang mengetahui baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran di dalam masyarakat. Namun, hal ini tidak merubah adanya pemikiran jika terdapat pembagian peran atau kerja bagi perempuan dan laki-laki.

Perempuan hingga saat ini masih berada di dalam lingkup budaya yang membatasi geraknya dalam ranah publik di Indonesia yang masih menjunjung tinggi standar patriarki yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam semua aspek masyarakat, meskipun ada kemajuan penting dalam beberapa

dekade terakhir. Banyak perempuan berjuang untuk menentukan tempat dan keberadaan mereka di masyarakat; kesulitan-kesulitan ini berkisar dari pilihan pendidikan yang terbatas hingga jalur pekerjaan yang sering kali terhalang oleh norma-norma gender. Perhatian perempuan terhadap kesetaraan dan kebebasan tetap membara meskipun demikian. Ketika mereka bekerja untuk mengubah konvensi sosial yang menghalangi perempuan untuk mewujudkan potensi penuh mereka, mereka terus mendorong dan mendukung satu sama lain. Revolusi budaya yang lebih setara dan inklusif sangat penting untuk dilakukan untuk menjamin bahwa perempuan dapat memperoleh kebebasan dan hak-hak yang menjadi hak setiap orang, bebas dari pembatasan yang disebabkan oleh jenis kelamin mereka. Oleh sebab itu, perempuan harus diberdayakan. Pemberdayaan secara konsep merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang melahirkan *freedom* atau kebebasan¹.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat yang dilakukan untuk menciptakan suatu kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhannya secara wajar, baik secara fisik, mental dan sosial. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan, pemeliharaan, kesejahteraan dan perlindungan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau yang secara

¹ Ruhana, I. (2012). Pemberdayaan Sumber Daya Manusia VS Daya Saing Global. Jurnal Profit, 6 (1), 50–56.

hukum bertanggungjawab terhadap anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertujuan agar anak mendapatkan hak dan kewajibannya sejak dini.

Gambar 1. 1.Persentase Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2023

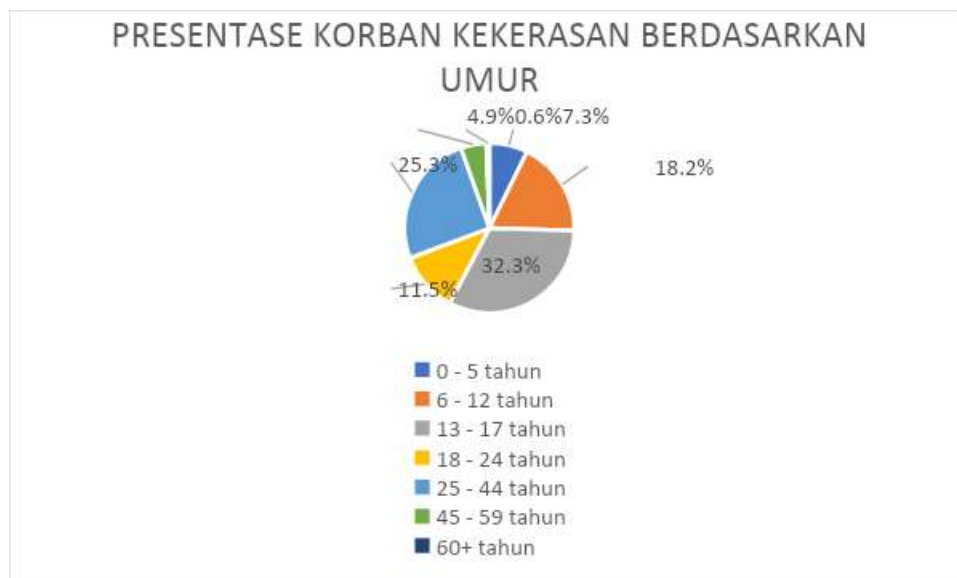


1.1.2. Empirik

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Indonesia hingga April tahun 2022 secara keseluruhan ada 275,7 juta jiwa. Dari total tersebut, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 138.303 juta jiwa atau 50,5 persen dan penduduk perempuan sebanyak 135.576 juta jiwa atau 49,5 persen². Jumlah ini menunjukkan jika penduduk laki-laki masih jauh lebih banyak jumlahnya dibanding perempuan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menguatkan adanya ketidaksetaraan gender yang masih kerap terjadi dan menjadi hal yang penting

² Badan Pusat Statistik. (n.d.). Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html>

dalam menanggapi akses, partisipasi, dan manfaat yang sama rata antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan.



Gambar 1. 2 Presentase Korban Kekerasan Berdasarkan Umur 2023

Diagram diatas menjelaskan jika terdapat 80 persen atau 19.231 korban perempuan yang mengalami kekerasan. Menurut usia sebanyak 56,7 persen korban adalah anak-anak³. Rentang usia korban untuk dewasa mulai dari 19 tahun, untuk remaja di umur 10-18 tahun sedangkan untuk anak-anak dalam kekerasan adalah dari usia 0 hingga 9 tahun⁴. Angka ini menunjukkan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak-anak bukan lagi angka biasa namun angka ini sudah termasuk dalam kategori tinggi. Ada banyak jenis kekerasan yang terjadi dan dilakukan kepada perempuan dan anak-anak, diantaranya seperti kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, *trafficking*, penelantaran hingga yang terbanyak adalah kasus kekerasan secara seksual dengan korban rentang dari berbagai usia. Kekerasan dilakukan di

³ SIMFONI-PPA. (n.d.). SIMFONI-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

⁴ PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2014

berbagai tempat kejadian, dan faktanya kekerasan paling banyak dilakukan dalam ruang lingkup rumah tangga baik dilakukan kepada perempuan sebagai istri maupun kepada anak-anak, Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah, Purbalingga tercatat kurang lebih terdapat 145 kasus kekerasan pada perempuan dan anak-anak dengan berbagai jenis tindak kekerasan yang terjadi dari bulan Januari hingga November 2023⁵. Kasus ini tersebar di berbagai kecamatan di Purbalingga dengan berbagai macam jenis kasus, akan tetapi kasus yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual terutama pada anak-anak dan remaja. Melihat data kekerasan yang terjadi begitu tinggi pada perempuan dan anak-anak, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak adalah desa atau kelurahan yang berperspektif gender dan hak anak dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, berkelanjutan, sesuai dengan visi pembangunan Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2, juga instruksi dari Presiden membuat Kementerian PPPA bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

⁵ W. (n.d.). Baca Berita | PPID. <https://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/read/data-statistik>

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah bentuk perhatian dari pemerintah untuk mencegah dan melindungi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kabupaten Purbalingga mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar adanya penyelenggaraan program di Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Pandansari dan Desa Sempor Lor di Purbalingga. Kedua desa dipilih berdasarkan pertimbangan karena sebelumnya kedua desa telah memiliki program yang sejalan dengan adanya program DRPPA. Desa Sempor Lor, sebelumnya sudah memiliki kelompok wanita tani yang diberi nama “Poktan Berkah Lestari” juga terdapat SK Sahabat Perempuan Anak dengan 21 relawan. Selain itu terdapat Desa Pandansari dimana di desa ini perempuan memiliki peran sebanyak 30% dalam Pemerintahan Desa yang dijalankan. Selain 2 Desa yang dipilih, ada 31 Desa tambahan yang ikut serta untuk menjalankan program yang diselenggarakan oleh

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak sendiri memiliki 10 indikator untuk capaian DRPPA, yakni (1) adanya pengorganisasian perempuan dan anak di desa, (2) tersedianya data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak, (3) tersedianya Peraturan Desa (Perdes) tentang DRPPA, (4) tersedianya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan DRPPA melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa, (5) presentase keterwakilan perempuan di Pemdes, BPD, LMD, lembaga adat desa, dan Badan Usaha Milik Desa, (6) presentase perempuan wirausaha di desa, utamanva

perempuan kepala keluarga, penyintas bencana dan penyintas kekerasan, (7) terwujudnya sistem pengasuhan berbasis hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari desa, (8) tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), (9) tidak ada pekerja anak, dan (10) tidak ada anak yang menikah di bawah usia 18 tahun (perkawinan usia anak).⁶ 10 indikator tersebut yang nantinya akan menjadi tolak ukur atas keberhasilan dari adanya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari Purbalingga.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari di Purbalingga?

1.3. Tujuan Penulisan

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang Desa Ramah Perempuan Peduli Anak dan implementasinya di Desa Sempor Lor dan Pandansari.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan menjadi sumber pengetahuan baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian ini digunakan untuk penguatan atas teori dan penelitian sebelumnya serta untuk mengetahui gambaran hasil implementasi Desa

⁶ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
<https://www.kemnpppa.go.id>

Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan 10 (sepuluh) indikator yang ada di dalamnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat menjadi bahan evaluasi dan sumbangan pemikiran kebijakan bagi pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah perbendaharaan kepustakaan dalam ilmu pemerintahan mengenai implementasi kebijakan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian lebih lanjut pada kajian yang sama.

1.5. Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul	Metode	Teori	Temuan
1.	Puspaningrum, D. & Sunartomo, A. F. (2022)	Desa Ramah Perempuan: Pengembangan Kapasitas Perempuan Desa Sumberpakem dalam Implementasi SDG's	Kualitatif	Teori Konsep <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's)	Penelitian yang dilakukan oleh Diah Puspaningrum dan Aryo Fajar Sumartomo dengan judul Desa Ramah Perempuan: Pengembangan Kapasitas Perempuan Desa Sumberpakem dalam Implementasi SDG's di Kabupaten Jember dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu wujud implementasi <i>Sustainable Development Goals</i> (SDG's) dalam bentuk pemberdayaan desa untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring dan desa tanggap budaya. Dengan adanya Program Pengabdian Kemitraan (PPK) di Desa Sumberpakem diharapkan dapat meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika belum semua indikator SDG's dilaksanakan dan sosialisasi terkait keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa ramah perempuan dan desa layak anak belum merata dan masih terdapat kendala.
2.	Bagus, N. (2022)	Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Kualitatif	Teori Pemberdayaan Sulistyani	Penelitian dengan judul Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu yang dilakukan oleh Namang Bagus, 2022 dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan terwujud melalui dua kegiatan yaitu pendampingan yang berupa sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, pendampingan hingga monitoring juga terwujud dengan adanya usaha kesejahteraan sosial seperti pelatihan tata boga, tata rias atau salon dan

		(DP3AP2KB) Kota Batu			menjahit. Pemberdayaan perempuan yang dilakukan di Kota Batu membuat korban KDRT lebih mandiri dari sebelumnya yang mana terbukti dengan pekerjaan yang mereka jalani dari pelatihan mampu membuktikan bahwa mereka dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, tak jarang pula masih terdapat kegagalan dalam bentuk pekerjaan tata rias atau salon karena modal yang pas-pasan membuat mereka berpikir dua kali untuk menjalankan usaha tersebut.
3	Silap, C., Kasenda, V., & Kumayas, N. (2019)	Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado.	Kualitatif	Teori Peranan Soerjono Soekanto	Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kota Manado telah dijalankan dengan cukup baik yang mengacu pada aturan-aturan yang ada seperti UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PP Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kota Manado masih kurang dalam sosialisasi yang dilakukan di berbagai media tentang bahaya kekerasan pada perempuan. Selain itu, adanya hambatan dalam proses pelaporan korban kekerasan ada banyak korban yang hanya datang sekali untuk melapor tetapi tidak melanjutkan kelengkapan berkas dan proses pendampingan. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kota Manado juga tidak memiliki sarana seperti Rumah Aman untuk korban kekerasan.
4	Rohayati, Y., & Kartini, E. (2019)	Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu	Kualitatif	Teori Implementasi Van Matter dan Hor	Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan perlindungan anak yang ada di Kota Bandung yang belum optimal, dimana tidak semua korban kekerasan anak melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Dari semua kasus yang ada yang telah dilaporkan ke UPT P2TP2A Bandung seharusnya dapat diselesaikan sesuai dengan prosedurnya, tetapi hal ini masih

		Pemberayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung			membutuhkan stabilisasi kinerja SDM, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta dalam waktu penanganan korban yang masih kurang efektif.
5.	Sania, R. D. (2020)	Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program “Inkubasi Usaha Mandiri” Pemerintah Kota Surabaya	Kualitatif	Teori Implementasi Merilee S. Grindle	Penelitian ini menekankan pada Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program “Inkubasi Usaha Mandiri” Pemerintah Kota Surabaya dimana aktor-aktor seperti pemerintah kota, lembaga non-pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk mengatasi permasalahan ini dengan memfokuskan pada perempuan khususnya ibu rumah tangga di Surabaya yang belum mendapatkan perhatian dalam kesetaraan gender. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah dibuat dinilai telah berhasil dengan adanya pelaksanaan program pelatihan seperti pelatihan pengolahan makanan, pelatihan menjait garmen dan pelatihan dalam pembuatan souvenir.
6	PA Mayako, Z Rusli (2020)	Pemberdayaan Perempuan Melalui Implementasi Strategi Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Di Provinsi Riau	Kualitatif	Teori Implementasi Hunger dan Wheelen	Penelitian ini membahas tentang program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di Provinsi Riau yang memberdayakan perempuan korban kekerasan. Dari semua penilaian yang dilaksanakan terhadap program ini menunjukkan semua hasil berjalan dengan baik. Program yang telah dilaksanakan selama kurang lebih satu tahun ini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau melalui UPT P2TP2A dapat dirasakan oleh korban KDRT, anggaran yang digunakan sudah tepat dan sesuai, dan berjalannya program sudah sesuai dengan standar operasional yang ada. Namun, tidak semua kabupaten/kota di Riau terdapat UPT dan kelengkapan untuk psikologi.

7	Putri, W. M., & Asrida, W. (2017)	Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS) Cahaya Kampung Tualang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPAPPKB) Kabupaten Siak Tahun 2016	Kualitatif	Teori Implementasi Van Metter Van Horn	Pada penelitian ini menghasilkan bahwa implementasi yang dilakukan dengan program Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Cahaya Kampung Tualang oleh D3PA2PKB Kabupaten Siak belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini dikarenakan oleh tidak terlaksanakannya secara baik tugas dan fungsi hingga pembinaan yang tak berkelanjutan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak dalam menjalankan program. Selain itu, program yang telah dijalankan selama dua tahun ini belum dapat membantu meningkatkan status perekonomian setiap keluarga yang termasuk dalam tujuan program.
8	Ningrum, O. W., & Hijri, Y. S. (2021)	Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Kualitatif	Teori Edward III	Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang dilaksanakan oleh Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak DP3AP2KB Semarang dinilai cukup baik dan komprehensif. Hal ini dapat dilihat dari adanya legislasi, dukungan anggaran, serta koordinasi lembaga dalam pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh korban. Namun, kendala dalam penerapan kebijakan tidak dapat dihindari seperti sistem koordinasi antar layanan yang masih kurang, SDM dalam pelayanan korban yang perlu ditambah, hingga penambahan anggaran dana agar jangkauan pelayanan yang tersedia mencapai semua.

9	Sandi, I. (2016)	Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	Kualitatif	Teori Van Metter Van Horn	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak tunawisma di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah belum sepenuhnya berhasil karena tidak semua aspek terpenuhi, karena Axample WC tidak bagus, kamar tidur sangat kecil. terutama kurangnya program khusus untuk anak-anak tunawisma karena kurangnya anggaran (sumber daya material), terutama kurangnya program khusus untuk anak-anak tunawisma karena kurangnya anggaran (sumber daya material).
10	Ibrahim, L. F., Seran, G. G., & Pratidina, G. G. (2019)	Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Bogor	Kualitatif	Teori Implementasi Usman	Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa program pemberdayaan perempuan yang dilakukan pemerintah Kota Bogor dengan tahap penyadaran, tahap analisis masalah, tahap penentuan skala prioritas masalah, tahap mencari penyelesaian masalah, tahap melaksanakan tindakan nyata dan tahap evaluasi telah dilakukan dengan cukup baik. Namun dalam program ini juga masih terdapat beberapa kekurangan seperti korban yang kurang kooperatif dengan aparat, keterbatasan konselor dalam segi jumlah dan waktu yang disediakan dan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai dalam pelayanan yang diberikan.
11	Hayuningsari, C. P. (2015)	Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (Studi pada Program Simpan Pinjam untuk Perempuan-SPP Di Dusun Ketapanrame Desa Ketapanrame	Kualitatif	Teori Implementasi George C Edward III	Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan Studi pada Program Simpan Pinjam untuk Perempuan-SPP Di Dusun Ketapanrame menghasilkan penelitian yang menunjukkan jika dalam pelaksanaannya program ini belum cukup baik, dilihat dari komunikasi yang dilakukan dengan sosialisasi terhadap masyarakat masih kurang dimana masyarakat tidak semuanya tahu dan paham dengan adanya program Simpan Pinjam untuk Perempuan. Selain itu birokrasi yang diciptakan memiliki double job antara implementor pada pelaksanaan PNPM MP studi pada program SPP di Kecamatan Trawas. Namun, terkait dengan petugas dan sarana prasarana yang disediakan kepada penerima program

		Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Jawa Timur)			dapat dikatakan cukup baik karena mereka dapat merasakan manfaat program ini secara maksimal.
12	Rezillah, A. A., Siswoyo, M., & Nariyah, H. (2018)	Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita Di Balai Penyuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.	Kualitatif	Teori Implementasi George C Edward	Pembahasan penelitian atas hasil dari Implementasi Kebijakan Program Bina Keluarga Balita Di Balai Penyuluhan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes belum dilakukan secara optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi penyuluhan antara petugas dengan masyarakat tentang adanya program Bina Keluarga Balita, sumberdaya manusia pun terbatas dimana hanya ada 2 (dua) orang yang harus membina 25 Desa di Kecamatan Banjarharjo, dan kurangnya sarana prasarana sebagai penunjang program seperti Alat Permainan Edukatif serta kurangnya dukungan dana dari pemerintah.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Teori Implementasi Kebijakan

Kata Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sebuah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan adanya dampak atau akibat terhadap sesuatu⁷. Berdasarkan penjelasan diatas maka implementasi adalah sebuah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan yang mana dalam kebijakan tersebut pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak dan manfaat yang baik bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Edwards III adalah sebuah proses yang menentukan baik atau tidaknya suatu kebijakan karena jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka yang menjadi sebuah tujuan kebijakan tidak akan terwujud.⁸ Wibawa mengatakan implementasi kebijakan merupakan sebuah tahapan yang diterapkan setelah adanya pembuatan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah guna mencapai hasil bagi masyarakat.⁹

⁷ Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

⁸ Edward III, George C (edited), 1984, Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London-England. h, 1.

⁹ Wibawa, Samodra.1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h, 2.

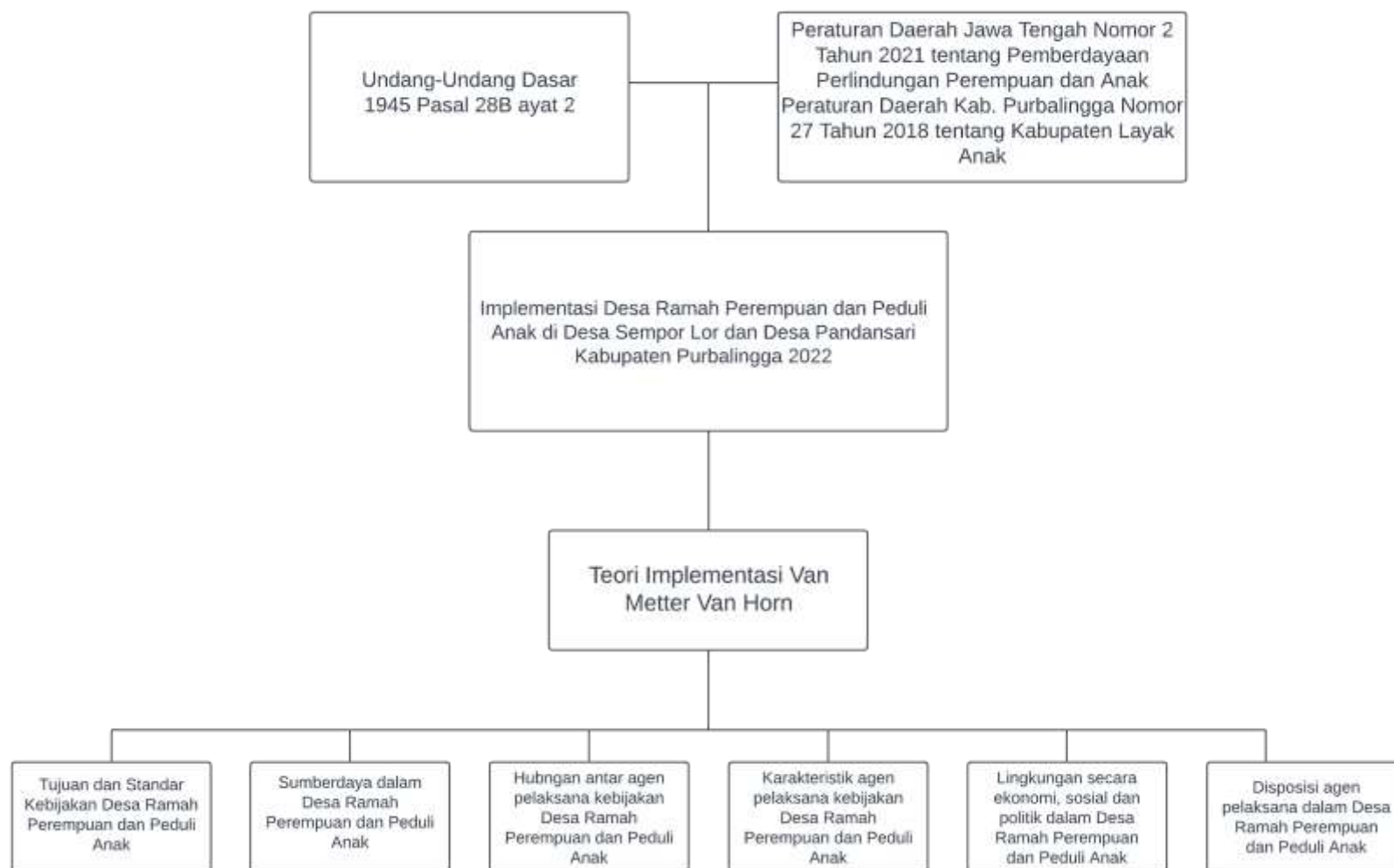
Grindle menyatakan, implementasi merupakan sebuah proses administrasi yang dapat diteliti pada program tertentu dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan.¹⁰ Sedangkan, Van Meter Van Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan untuk memahami proses implementasi kebijakan publik yang di dalamnya memiliki 6 variabel utama sebagai tolak ukur antara hubungan kebijakan dengan kinerja yang dijalankan.

Pada penelitian ini, peneliti mengacu pada teori Implementasi Van Meter Van Horn dengan 6 (enam) indikator keberhasilan implementasi, meliputi: Tujuan dan Standar Kebijakan; Sumberdaya; Hubungan antar agen pelaksana; Karakteristik agen pelaksana; Lingkungan secara ekonomi, sosial dan politik; dan Disposisi agen pelaksana. Tujuan dan standar kebijakan harus dibuat dengan jelas agar tidak terjadi adanya perbedaan pandangan antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan. Sumberdaya sebagai pendukung pelaksanaan seperti materi, manusia, dan berbagai intensif lainnya yang dapat menunjang jalannya pelaksanaan kebijakan. Komunikasi atau hubungan antar agen pelaksana perlu diperhatikan guna memperlancar proses berjalannya informasi dan dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan. Karakteristik yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan implementasi dapat dinilai dari adanya dukungan dari lembaga yang dapat membantu mencapai tujuan, struktur birokrasi, kemampuan dalam organisasi yang nantinya memegang kontrol dan pertanggung

¹⁰ Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press. h, 7.

jawaban dalam implementasi. Lingkungan secara ekonomi, sosial, dan pemerintahan juga perlu diperhatikan karena berperan penting dan terakhir, disposisi untuk respon dan pemahaman agen terhadap kebijakan pelaksanaan.

1.7. Kerangka Berpikir



1.8. Operasional Konsep

1.8.1. Konsep Implementasi

Implementasi menurut Van Meter Van Horn diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan untuk memahami proses implementasi kebijakan publik yang di dalamnya memiliki 6 variabel utama sebagai tolak ukur antara hubungan kebijakan dengan kinerja yang dijalankan. Variabel tersebut juga akan menilai berhasil atau tidaknya implelementasi suatu program, dan dapat dipengaruhi oleh variable-variabel yang mungkin muncul. Variable-variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi tersebut antara lain:

1. Tujuan dan standar kebijakan. Rincian yang jelas seperti tujuan dan standar dari adanya sebuah program menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan agar program yang sudah terencana dapat dilakukan dan berjalan dengan baik. Pada implementasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak, variable merujuk pada tujuan dan standar dari program mulai dari penyusunan program, pedoman yang digunakan, rincian penentuan lokasi program, dan pelaksanaan program di lokasi yang telah ditunjuk.
2. Sumberdaya. Tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu implementasi bergantung pada sumberdaya yang tersedia baik sumberdaya manusia atau sumberdaya pendukung lainnya yang mana sumberdaya tersebut harus memiliki kualitas dan kompetensi yang bagus dalam menunjang

keberhasilan implementasi. Dalam implementasi program DRPPA terdapat sumberdaya manusia dan non-manusia. Sumberdaya non-manusia yang dimaksud berupa sumber dana baik dari penyalurannya hingga pengelolaan dana untuk program, dan sumberdaya teknologi yang menunjang berjalannya program. Sedangkan sumberdaya manusia dalam DRPPA dimaksudkan untuk para agen pelaksana program seperti pemerintahan kabupaten, pemerintahan desa, maupun organisasi lainnya yang termasuk di dalam program.

3. Hubungan antar agen pelaksana. Efektivitas yang tercipta dari adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar agen pelaksana agar implementasi program dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungan koordinasi dan komunikasi dari semua tingkatan agen pelaksana program DRPPA yang berupa pengawasan yang mengontrol jalannya program agar sesuai tujuan dan standar.
4. Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan implementasi dapat dinilai dari adanya dukungan dari lembaga yang dapat membantu mencapai tujuan, struktur birokrasi, kemampuan dalam organisasi yang nantinya memegang kontrol dan pertanggung jawaban dalam implementasi.
5. Lingkungan secara ekonomi, sosial dan politik. Keberhasilan implementasi tidak akan luput dari kondisi lingkungan secara ekonomi, dukungan dari kelompok yang memiliki peran penting, karakteristik dari partisipan dimana mereka akan mendukung atau menolak, dan respon yang diberikan oleh para

elite atau pejabat politik. Kondisi lingkungan secara ekonomi, sosial, dan politik menjadi dasar penentuan dari lokasi program DRPPA, mengingat indikator yang termasuk di dalamnya.

6. Disposisi agen pelaksana. Disposisi atau sikap dari para agen pelaksana adalah salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan sebuah implementasi melihat bagaimana para agen merespon dan memahami program yang akan dijalankan. Dalam konteks implementasi program DRPPA, disposisi agen menjelaskan tanggapan dari sikap pelaksana, pemahaman para agen terhadap program, dukungan dan komitmen yang dilakukan terhadap program, hingga hambatan atau kendala yang diterima yang menjangkau keberhasilan implementasi.

Dengan 6 variabel utama yang dikemukakan oleh Van Metter Van Horn dalam teori implementasinya, akan mempermudah sebagai alat tolak ukur apakah implementasi yang dijalankan telah sesuai dengan program dan tepat sasaran atau tidaknya yang mampu membantu untuk menjelaskan mengenai keberhasilan, realisasi, dan ketepatan sesuai dengan tujuan awal program.

1.9. Metode Penelitian

Penelitian berasal dari kata *research* dalam Bahasa Inggris yang artinya adalah riset atau dapat diartikan juga sebagai pencarian kembali.¹¹ Metode penelitian secara umum adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

¹¹ Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara. h. 1.

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan salah satu jenis metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.¹²

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta dan sifat-sifat populasi yang ada di lapangan secara faktual untuk digambarkan lebih detail. Dalam penelitian ini gambaran yang telah didapatkan berdasarkan fakta dan fenomena yang ada kemudian dianalisis dalam bentuk kata-kata dan kesimpulan.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari yang mana nantinya diharapkan dapat diperolehnya data dan informasi mengenai implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari Purbalingga.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah:

1. 1 (satu) orang Staf P3A Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak

¹² E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta : Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998), h. 34

(DINSOSDALDUKKBP3A) Purbalingga yang bertanggungjawab atas program DRPPA dan Pemerintahan Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari yang meliputi Staf Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di DINSOSDALDUKKBP3A Purbalingga, Kepala Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, Sekretaris Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari sebagai pegawai instansi ini memiliki wewenang dalam pelaksanaan kebijakan Implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari di Purbalingga.

2. 2 (dua) Masyarakat di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, Purbalingga menjadi subjek yang nantinya akan diteliti dalam penelitian ini karena mereka merupakan bagian dari terlaksananya implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak juga Organisasi yang mengayomi Perempuan dan Anak yang ada di kedua desa tersebut.

Objek diatas akan digunakan sebagai responden untuk mengukur implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut (Arikunto, 2006) teknik ini bersumber pada pandangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Teknik ini diambil karena penentuan sampel sesuai dan berdasarkan atas tujuan penelitian yang akan dilakukan.

1.9.4. Jenis Data

Jenis data dalam melakukan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer menurut Bungin adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau subjek penelitian.¹³ Menurut Amirin, data primer adalah data-data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber asli yang memuat atau memiliki informasi atau data penelitian.¹⁴ Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber asli yang memuat informasi atau data penelitian atau juga bisa disebut sebagai sumber kedua. Biasanya data sekunder diperoleh dari sumber bacaan seperti buku, jurnal atau website atau juga bisa didapatkan dari dokumen-dokumen pendukung lainnya.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud tertentu dimana pewawancara mengajukan pertanyaan

¹³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 122

¹⁴ Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian...*, h. 132.

kepada terawawancara atau narasumber yang nantinya akan dijawab.¹⁵ Di dalam teknik pengumpulan data, wawancara adalah teknik yang digunakan peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi yang tidak bisa didapatkan melalui observasi atau kuisioner. Biasanya sebelum melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber.

Wawancara dilakukan kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan staff di DINSOSDALDUKKBP3A Purbalingga, Kepala Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, Pemerintahan Desa dan Staff di Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari, Organisasi yang mengayomi Perempuan dan Anak di kedua desa, dan masyarakat yang ada di dalam Desa Sempor Lor dan Desa Pandansari yang ikut terlibat dalam Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

b. Dokumentasi

Menurut Burhan (2008, 122) dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mencari sebuah *timeline* sejarah. Di dalam penelitian ini, teknik pengambilan data dokumentasi dilakukan dengan dokumentasi foto-foto yang terkait dengan penelitian.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk melakukan pengolahan dan penganalisisan data yang telah di peroleh dengan

¹⁵ Lincoln dan Guba, dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif., hlm. 186.

cara menyalurkan data dalam rancangan konsep sebagai dasar untuk dilakukannya analisis.

1.9.6.1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian penyederhanaan, dan transformasi dari data-data kasar yang didapatkan di lapangan selama proses penelitian berlangsung. Proses reduksi dilakukan dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat partisi dan menulis memo-memo. Reduksi data digunakan sebagai salah satu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan atau menarik kesimpulan.

1.9.6.2. Triangulasi

Teknik triangulasi digunakan oleh peneliti sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data yang telah didapatkan. Menurut Moeloeng (2004:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian dengan empat macam teknik triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber sebagai teknik analisis data.

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton,1987:331). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

1.9.6.3. Menarik Kesimpulan

Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang peneliti akan mencari arti dari benda-benda, mencatat keaturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab dan akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang awalnya belum terlihat dan belum jelas akan menjadi terperinci. Kesimpulan final akan bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan di lapangan, pengkodeannya, dan kecakapan peneliti.